



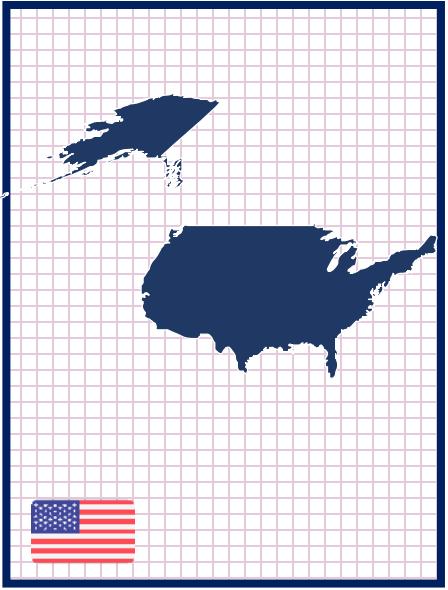
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN



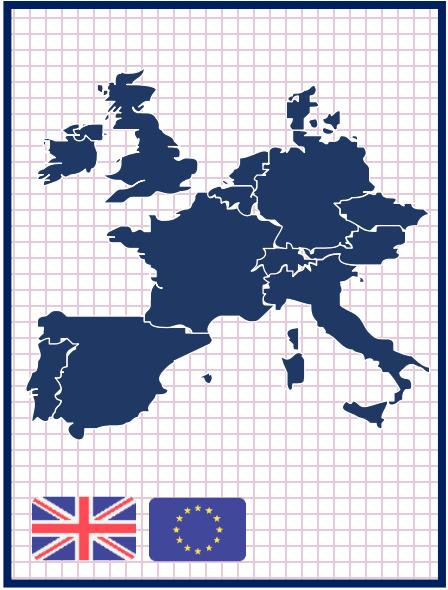
Kebijakan Umum Perimbangan Keuangan 2021

Bandung, 9 Maret 2020

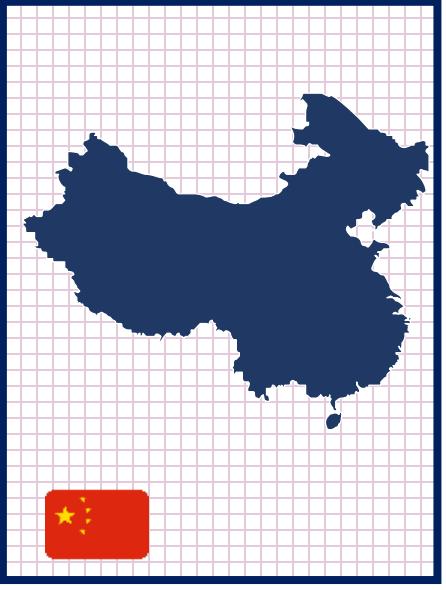
Tantangan Perekonomian Global



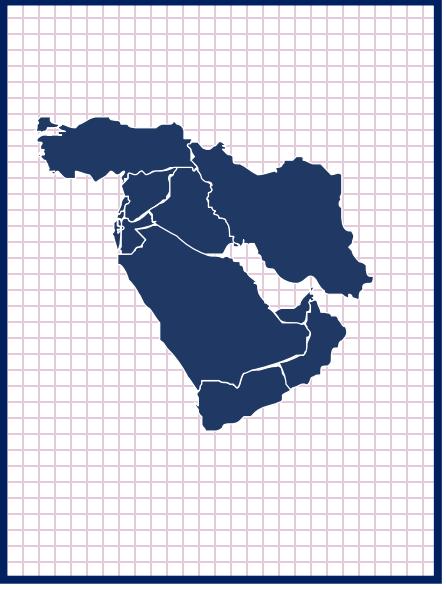
- Kebijakan Moneter US
- *Deadlock* Perundingan Perdagangan US-Tiongkok setelah Phase I berhasil
- Pemilu US & Dinamika Politik *Impeachment* Trump



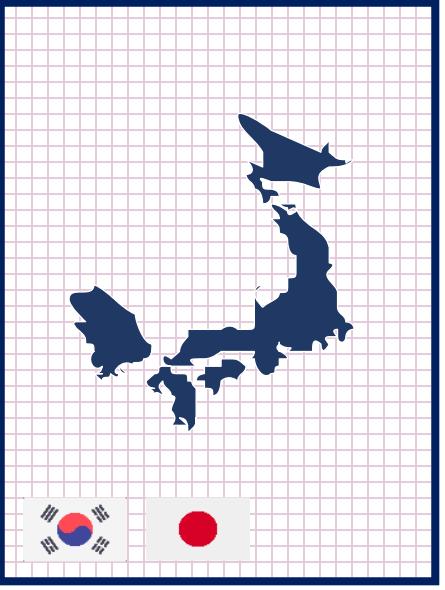
- Tindak lanjut *Brexit*
- Potensi Resesi Eurozone
- Kebangkitan populisme politik/politik *right wing*



- Krisis Politik Hongkong
- Reformasi Struktural Perekonomian Tiongkok Tidak Mulus
- Wabah Corona Virus Berpotensi Menganggu Perekonomian global



- *Civil War* Suriah & Yaman
- Konflik Regional Saudi-Iran-Israel, USA-Iran
- Krisis Politik Irak
- Konflik Israel-Palestina



- Potensi perang Dagang Jepang-Korsel
- Melemahnya Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Asia Timur
- Gangguan Stabilitas Kemanan Akibat konflik dengan Korea Utara

Dampak Perekonomian Global terhadap Perekonomian Nasional

Dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional, Indonesia harus menghadapi berbagai sumber ketidakpastian baik global maupun domestik, salah satunya adalah virus corona.

Disrupsi Tiongkok & Global	
Pariwisata <ul style="list-style-type: none">Turis dari TiongkokTuris dari negara lain (behavioral responses)	<i>Share Turis Tiongkok di Indonesia 13%, terbesar ke-2 setelah Malaysia</i>
Disrupsi dagang dan rantai pasokan <ul style="list-style-type: none">27% impor non migas dari Tiongkok16,7% pangsa pasar ekspor Indonesia ke Tiongkok	<i>Berkurangnya pasokan dari Tiongkok, serta larangan impor hewan hidup dan makmin dari Tiongkok</i>
Penurunan pertumbuhan ekonomi Tiongkok	<i>Penurunan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebesar 1% berdampak ke Indonesia 0,3 – 0,6%</i>
Penurunan harga komoditas	<i>Tiongkok konsumen komoditas besar Indonesia: CPO (importer ke-2 terbesar) dan batubara (ke-3)</i>

Limpasan ke Indonesia	
Kinerja ekspor Indonesia	<i>Baik barang maupun jasa (turis)</i>
Kinerja pertumbuhan ekonomi/ income	<i>sektor-sektor terdampak akomodasi, transportasi, retail, manufaktur</i>
Current account deficit	<i>Penurunan kinerja perdagangan barang dan penurunan wisman berpotensi mendorong peningkatan CAD</i>
Aliran modal	<i>Penurunan risk appetite investor mendorong peralihan investasi pada instrumen safe haven</i>
Kinerja Fiskal	<i>Potensi penurunan penerimaan antara lain dari bea masuk & PNBP SDA</i>

Estimasi Dampak

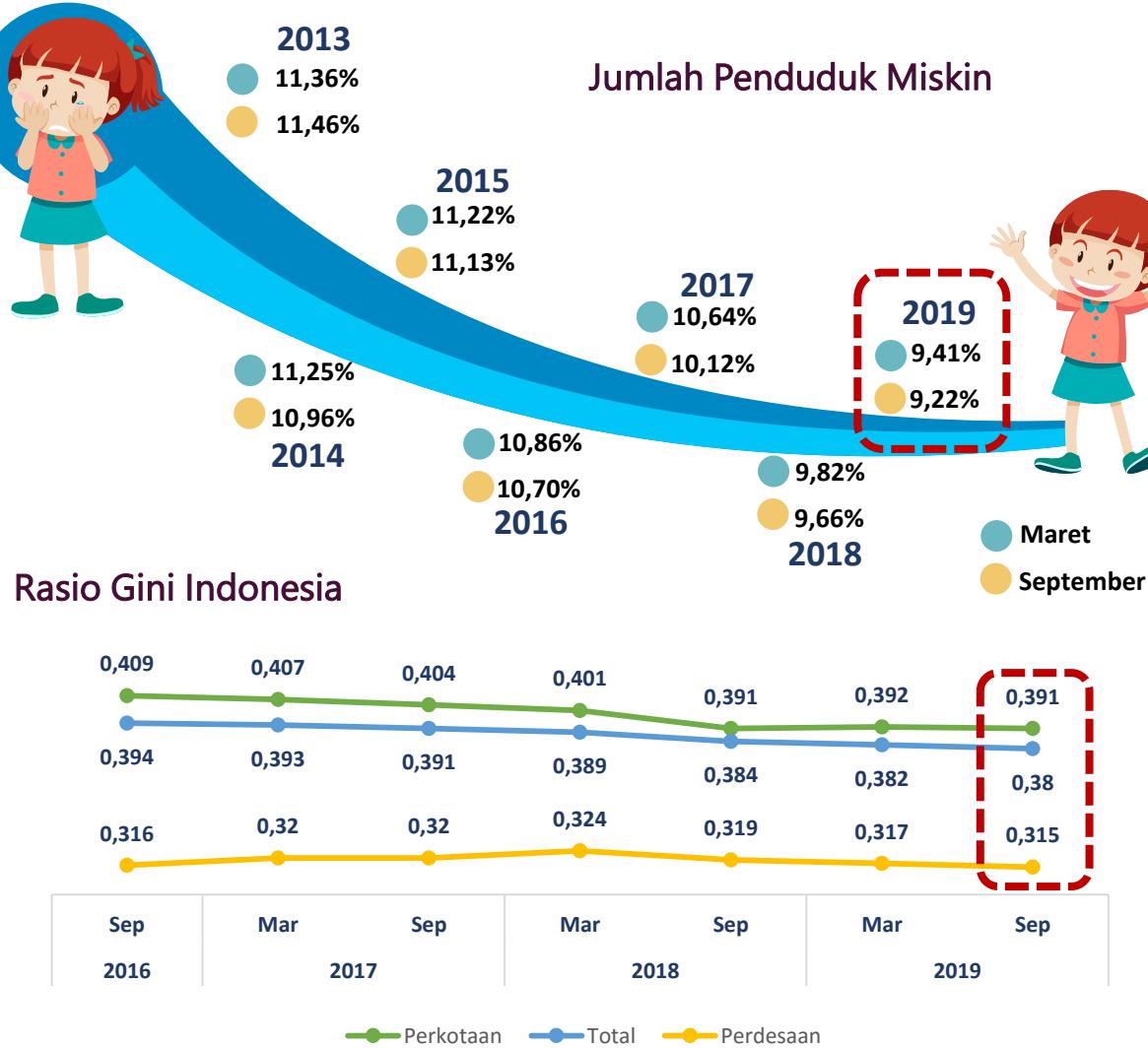
UOB → negatif 0,1 – 0,2%
World Bank → negatif 0,3%
Samuel International → negatif 0,6%
Citi Bank → negatif 0,1-0,2%
Prospera → negatif 0,1-0,54%



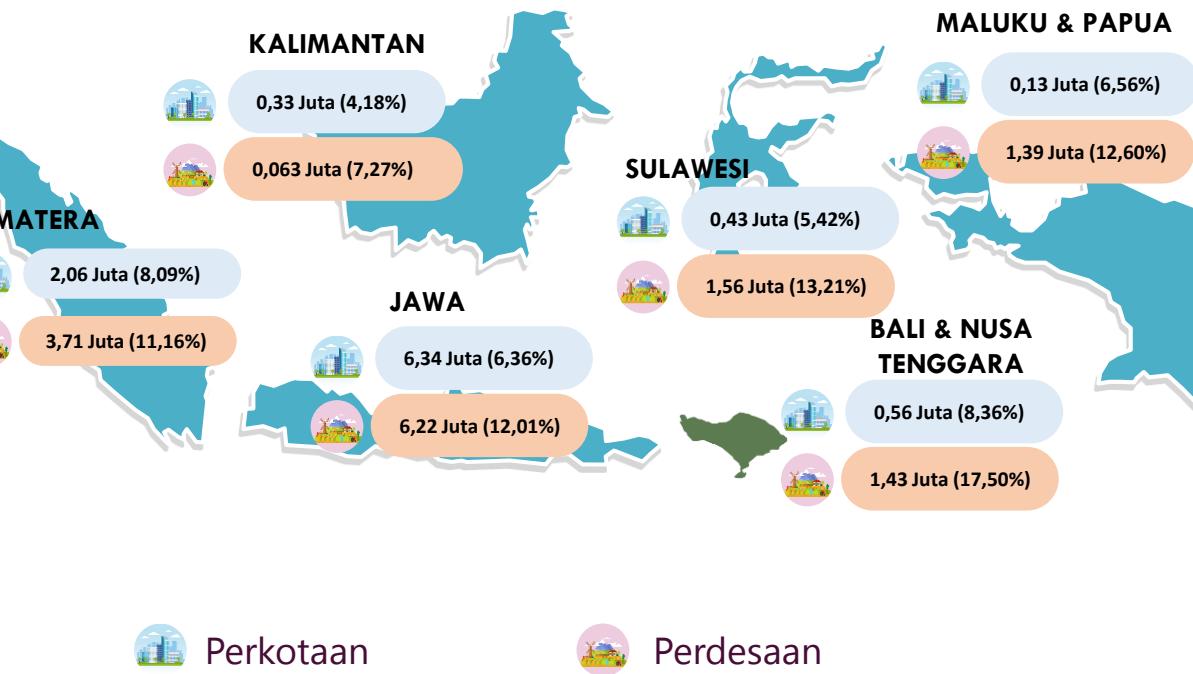
Tantangan Perekonomian Nasional (1)



Meski mengalami penurunan, kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi tantangan utama pembangunan nasional



Peta Tingkat Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan menurut Pulau



Sumber: BPS 2019, diolah

Tantangan Perekonomian Nasional (2)

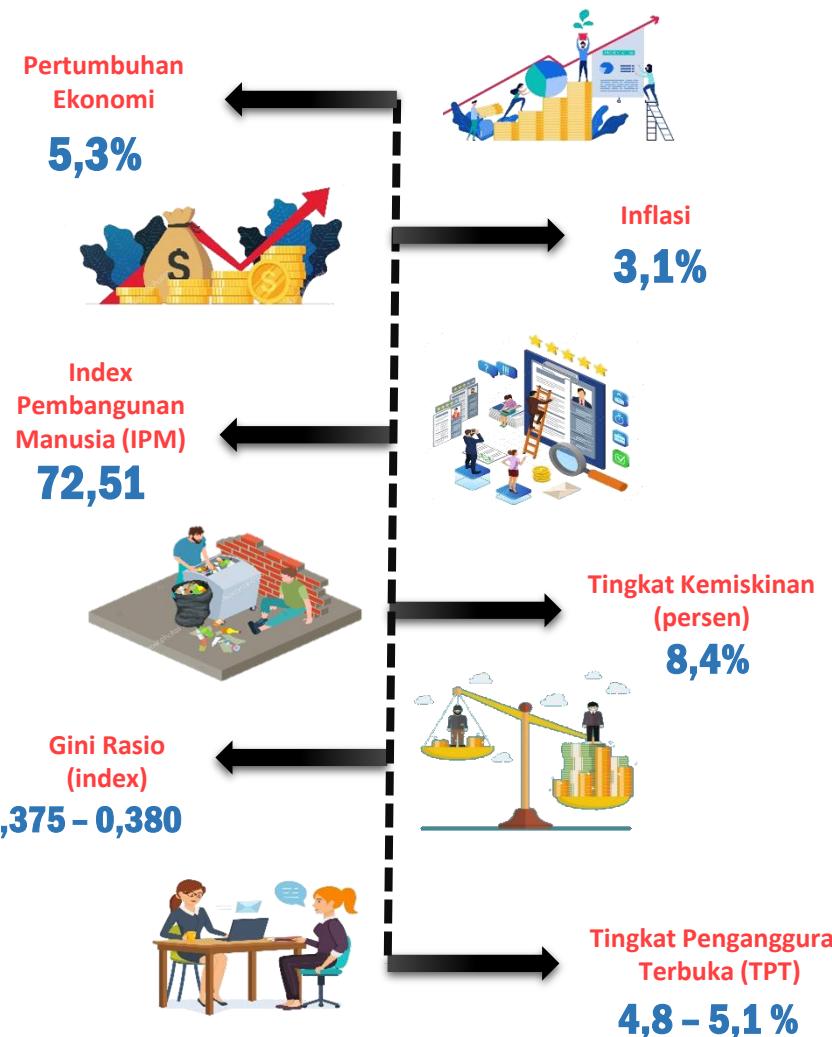


APBN sebagai Instrumen untuk Mendorong Perekonomian



APBN dengan counter cyclical policy untuk menjaga pencapaian target perekonomian dan pembangunan nasional

Target Perekonomian 2020



Respon Kebijakan APBN

Akselerasi Pencairan

PBI Program JKN
Dana Desa
Pencairan anggaran strategis

Simplifikasi Pelaksanaan APBN

Percepatan Penunjukan Pejabat (KPA, PPA, Bendahara)
Percepatan Tender (Belanja Modal)
Percepatan revisi DIPA

Kebijakan Stimulus Fiskal

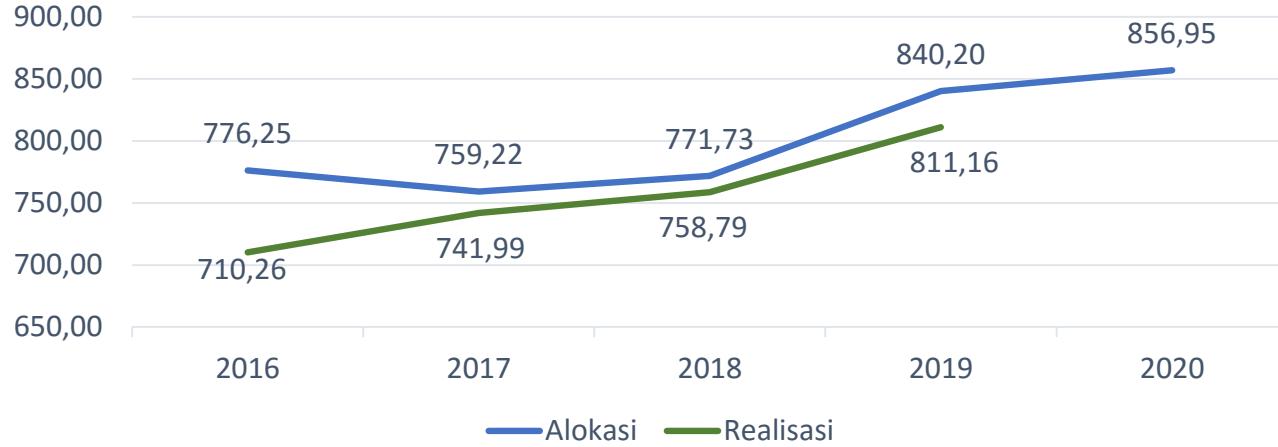
1. Melindungi Daya Beli 40% Masyarakat Terbawah, melalui Kartu Sembako dan Subsidi Bunga Perumahan
2. Insentif Aktivitas Pariwisata:
 - ✓ Insentif kepada airlines, travel agent, dan tourism marketing representative di luar negeri untuk mendatangkan wisman
 - ✓ Insentif tiket bagi wisatawan domestik untuk 12 destinasi pariwisata
 - ✓ Hibah ke Daerah sebagai kompensasi Pajak Hotel dan Restoran
 - ✓ Relaksasi DAK Fisik Pariwisata
3. Melindungi tenaga kerja melalui Kartu Pra-Kerja
4. Insentif Pajak untuk Industri Terdampak:
 - ✓ Relaksasi PPh Pasal 22 Impor
 - ✓ Relaksasi PPh Pasal 21
 - ✓ Relaksasi Restitusi PPN dipercepat
 - ✓ Pengurangan PPh Pasal 25



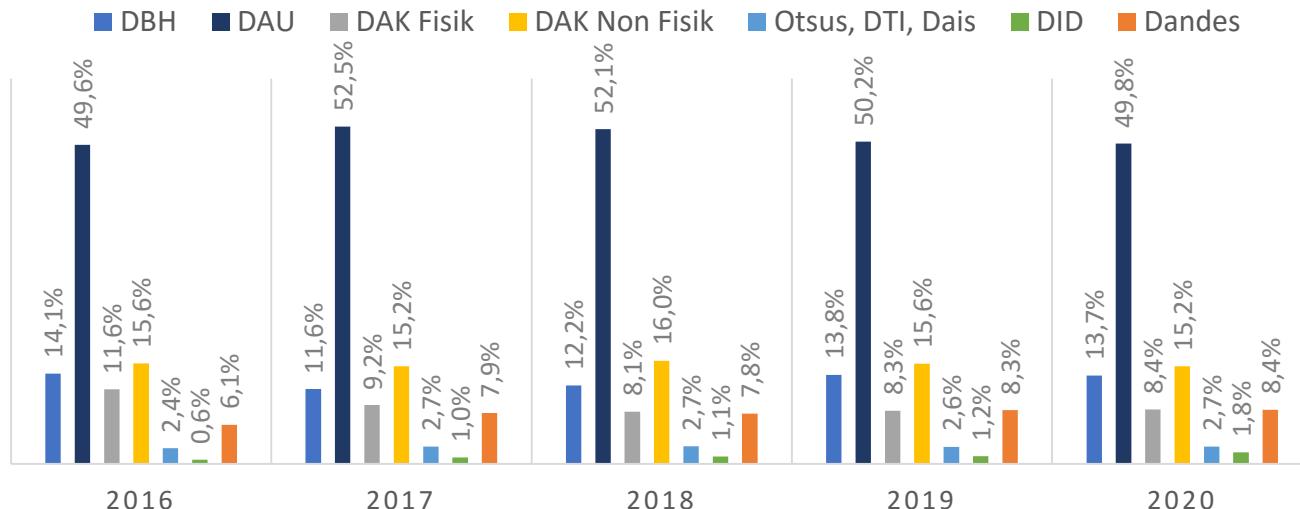
Perkembangan TKDD



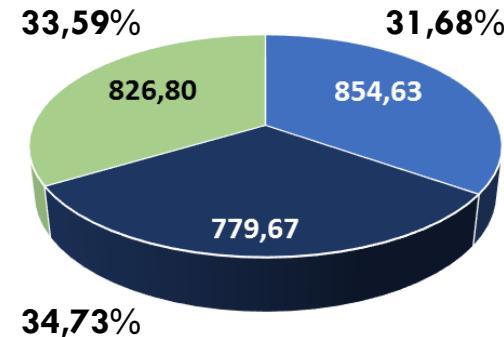
PERKEMBANGAN TKDD (TRILIUN RUPIAH)



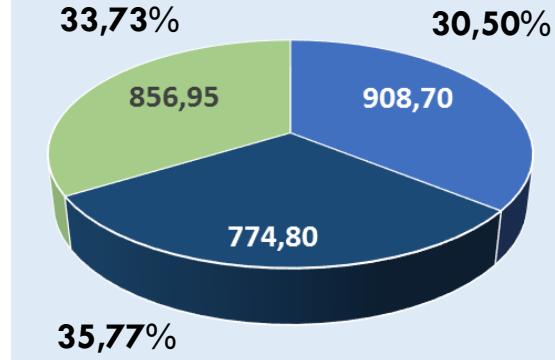
KOMPOSISI ALOKASI TKDD



2019



2020



Tahun 2016-2020 TKDD cenderung naik (10,4%), sebagian besar berupa DAU (50,8%), dan yang lainnya berupa DAK Non Fisik, DBH, DAK Fisik, Dana Desa, Dana Otsus, DTI papua, dan Dais, serta Dana Insentif Daerah.



Arah Kebijakan TKDD 2021



ARAH KEBIJAKAN UMUM

1. **Mendorong produktivitas**, nilai tambah ekonomi, dan membuka kesempatan kerja antara lain melalui pengembangan potensi ekonomi daerah serta pemberdayaan sentra ekonomi masyarakat.
2. **Melanjutkan pembangunan infrastruktur** konektivitas dan pusat pertumbuhan di daerah untuk **pemerataan pembangunan kewilayahan**.
3. Mendorong **akselerasi daya saing dan investasi** di daerah antara lain melalui inovasi, kemudahan berusaha, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan insentif yang mendukung iklim investasi dan mendorong ekspor.
4. **Integrasi dan sinergi antar program** yang relevan serta mendorong pemda untuk **memperkuat pengelolaan anggaran** secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Postur APBN 2020

Pendapatan Negara **2.233,2**

Penerimaan Perpajakan **1.865,7**
Penerimaan Negara Bukan Pajak **367,0**
Penerimaan Hibah **0,5**

Belanja Negara **2.540,4**

Belanja Pemerintah Pusat **1.683,5**
Transfer ke Daerah dan Dana Desa **856,9**

Keseimbangan Primer **(12,0)**

Defisit Anggaran **(307,2)**
% terhadap PDB **(1,76)**

Pembiayaan Anggaran **307,2**

DBH

Pengalokasian memperhatikan realisasi DBH 3 tahun terakhir, percepatan penyelesaian kurang bayar, penggunaanya 25% utk infrastruktur, penyaluran berdasarkan kinerja

DAU

Pengalokasian pagu DAU nasional dalam APBN bersifat final, pengalokasian memperhitungkan gaji 13, THR, dan formasi CPNSD, penyaluran berdasarkan kinerja pelayanan publik

DID

Pengalokasian berdasarkan beberapa indikator transformasi ekonomi, penyederhanaan formulasi, dan peningkatan produktivitas, penyaluran berdasarkan capaian output.

Otsus

Penguatan monitoring capaian output dengan **pengetatan persyaratan** penyaluran Dana OTSUS dan DTI

DAK Fisik

Diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing, refocusing bidang dan subbidang untuk penanganan stunting, ketahanan pangan, dan merdeka belajar, sinkronisasi dengan penganggaran K/L, penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan

DAK Non Fisik

Percepatan pemenuhan SPM, sinkronisasi dengan DAK Fisik dan penganggaran K/L.

Dais

Memperkuat peran **APIP** dalam pengelolaan DAIS serta penguatan monitoring dan evaluasi

Dana Desa

Pengalokasian diarahkan untuk mempercepat pengentasan desa tertinggal dan jumlah penduduk miskin, dan pemberian reward kepada desa dengan kinerja baik, penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan.

KEBIJAKAN EXISTING 2020



Perbaikan pengelolaan DBH berdasarkan prinsip *by origin* dan *by actual revenue*.



Kebijakan Dana Transfer Umum (DBH + DAU) sebesar 25% untuk belanja infrastruktur layanan dasar publik, serta memperkuat monitoring pelaksanaannya.



Penyaluran DBH triwulan IV diprioritaskan untuk penyelesaian kurang bayar DBH TA sebelumnya dan/atau tahun berjalan dengan memperhitungkan lebih bayar tahun sebelumnya.



Mengendalikan alokasi DBH dalam rangka meminimalisir potensi Kurang/Lebih Bayar, dengan memperhatikan proyeksi DBH berdasarkan realisasi DBH paling kurang 3 tahun terakhir.



Menyalurkan DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara dengan mempertimbangkan kinerja pemerintah daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan pemeliharaan lingkungan.



Memperbaiki pola penyaluran DBH setiap triwulan yang didistribusikan perbulan dalam rangka memberikan kepastian bagi daerah dalam pengelolaan kas daerah.

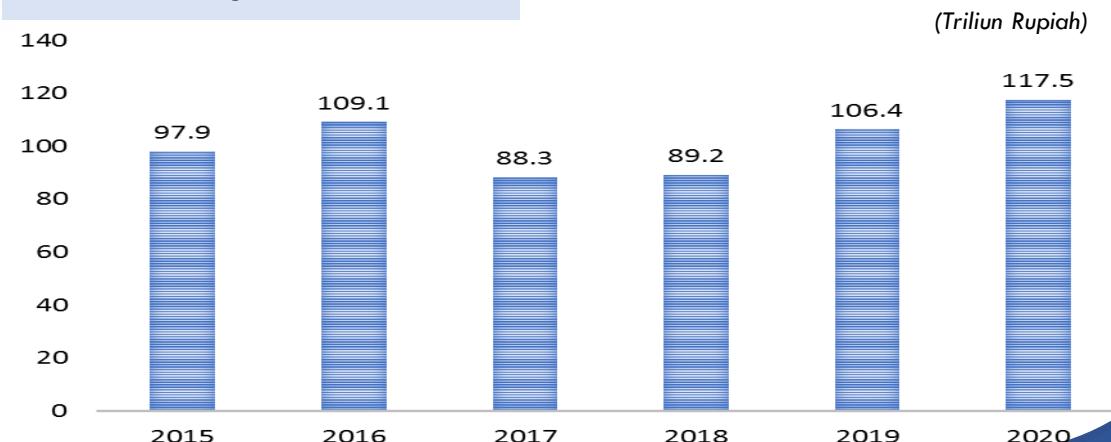
ARAH KEBIJAKAN 2021



- **Perbaikan** pengelolaan DBH berdasarkan prinsip *by origin* dan *by actual revenue*
- **Kebijakan penyaluran** DBH berdasarkan **realisasi penerimaan negara**, dgn memperhatikan kondisi keuangan negara

- **Penguatan** implementasi penggunaan 25% DBH & DAU untuk belanja infrastruktur publik;
- **Percepatan** penyelesaian Kurang Bayar yang memperhitungkan Lebih Bayar DBH;
- **Pengalokasian DBH dengan proyeksi** berdasarkan realisasi DBH paling kurang 3 tahun terakhir.
- **Menyalurkan DBH berdasarkan capaian kinerja dukungan penerimaan negara (DBH Pajak) dan capaian kinerja lingkungan (DBH SDA)**

PERKEMBANGAN DBH



Kebijakan TKDD - DAU



KEBIJAKAN EXISTING 2020



URAIAN	APBN 2019	APBN 2020
1 DAU FORMULA	414.873,6	418.707,9
2 DAU TAMBAHAN	3.000,0	8.382,7
a BANTUAN KELURAHAN	3.000,0	3.000,0
b BANTUAN PENYETARAAN SILTAP	-	1.122,1
c BANTUAN GAJI PPPK	-	4.260,6
DAU TOTAL	417.873,6	427.090,6

ARAH KEBIJAKAN 2021

- Pengalokasian pagu DAU nasional dalam APBN bersifat **final**;
- Penyempurnaan **formula DAU** dengan mengevaluasi bobot dan variable **agar tujuan horizontal imbalance dapat terwujud**;
- Dalam penghitungan Alokasi Dasar, kebijakan Pemerintah Pusat yang berdampak kepada Pemda akan menjadi pertimbangan, seperti Gaji 13, THR, serta formasi CPNSD;
- Mekanisme penyaluran dilakukan asimetris berdasarkan kinerja layanan publik oleh pemerintah daerah (*performance based transfer*).

PERKEMBANGAN DAU TA 2015 – 2020



Kebijakan TKDD – DAK Fisik



KEBIJAKAN EKSISTING 2020

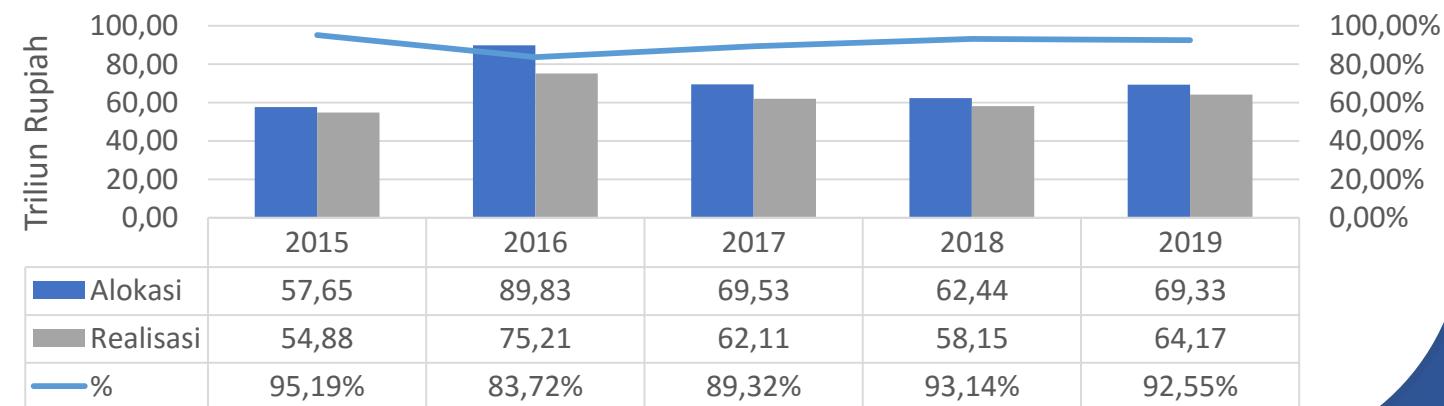
- Melanjutkan penerapan **konvergensi pendanaan** antara DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Dana Desa untuk kegiatan pengentasan *stunting* serta program Indonesia bersih & sehat (air minum, sanitasi, kesehatan & LHK)
- Melanjutkan penguatan sinergi pendanaan kegiatan yang dibiayai dari K/L dan DAK Fisik.
- Melanjutkan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui penguatan **peran APIP**.
- Melanjutkan penguatan **kebijakan afirmasi** utamanya infrastruktur konektivitas: daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar, percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.



KEBIJAKAN DAK FISIK TA 2021

- Penguatan** fokus pemanfaatan untuk **meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah**
- Penguatan** sinergi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dengan belanja K/L dan hibah daerah
- Refocusing** bidang, subbidang, dan menu kegiatan DAK Fisik dalam mendukung program-program pemerintah yang terintegrasi, seperti **program penurunan stunting, ketahanan pangan, merdeka belajar**.
- Dukungan** pendanaan persiapan daerah penyangga **Ibukota Negara (IKN) baru**.
- Peningkatan** kualitas perencanaan dan pelaporan di daerah, antara lain melalui **pemanfaatan teknologi informasi**.
- Perbaikan** skema penyaluran dalam rangka perbaikan layanan publik yang lebih cepat

Perkembangan DAK Fisik (Triliun Rupiah)



KEBIJAKAN EKSISTING 2020

- Meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah, terutama bidang pendidikan dan kesehatan.**
- Menyempurnakan *unit cost* dalam proses pengalokasian.**
- Memutakhirkan data sasaran yang mencerminkan **kebutuhan riil** daerah.**
- Memperkuat kebijakan afirmasi untuk mengejar ketertinggalan **kuantitas dan kualitas layanan publik.****



ARAH KEBIJAKAN 2021

- Pengalokasian yang mampu mendorong peningkatan capaian output dan outcome**
- Dukungan Pendanaan bagi program prioritas nasional yang menjadi fokus APBN 2021 melalui **Verifikasi atas usulan DAK Nonfisik baru****
- Pemantauan capaian output/outcome dalam rangka mendukung pemenuhan SPM daerah melalui **Integrasi aplikasi pelaporan antar kementerian****
- Penguatan sinergi dan sinkronisasi pengelolaan DAK Fisik serta DAK Non Fisik dengan belanja KL dan hibah**

Perkembangan DAK Non Fisik



KEBIJAKAN EXISTING 2020



Indikator yang digunakan selaras dengan pencapaian prioritas nasional.



Meningkatkan peran insentif dalam mendorong kualitas pengelolaan keuangan daerah yang pruden.



Mendorong peningkatan investasi dan ekspor



Mendorong peningkatan kualitas belanja melalui pemenuhan *mandatory spending*



Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan dengan menggunakan aplikasi pelaporan DID

ARAH KEBIJAKAN 2021

- ✓ **Penyederhanaan** dan menjaga **konsistensi** formula DID.
- ✓ **Penguatan** komponen formula yang memiliki **dampak besar** terhadap perekonomian nasional.
- ✓ Beberapa indikator yang mendorong **transformasi ekonomi** dan **peningkatan produktivitas** seperti kemudahan berusaha, peningkatan ekspor dan investasi tetap dipertahankan dengan memperbaiki validitas dan akurasi data.
- ✓ **Penambahan indikator** yang mendorong **pertumbuhan ekonomi nasional** seperti penciptaan lapangan kerja.
- ✓ **Penyaluran** berdasarkan **pencapaian output** yang telah ditetapkan.

PERKEMBANGAN DID



KEBIJAKAN EXISTING 2020



Meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan di daerah.



Mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan.



Meningkatkan akuntabilitas melalui penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan



Memperkuat monitoring dan evaluasi melalui sinergi dengan K/L terkait

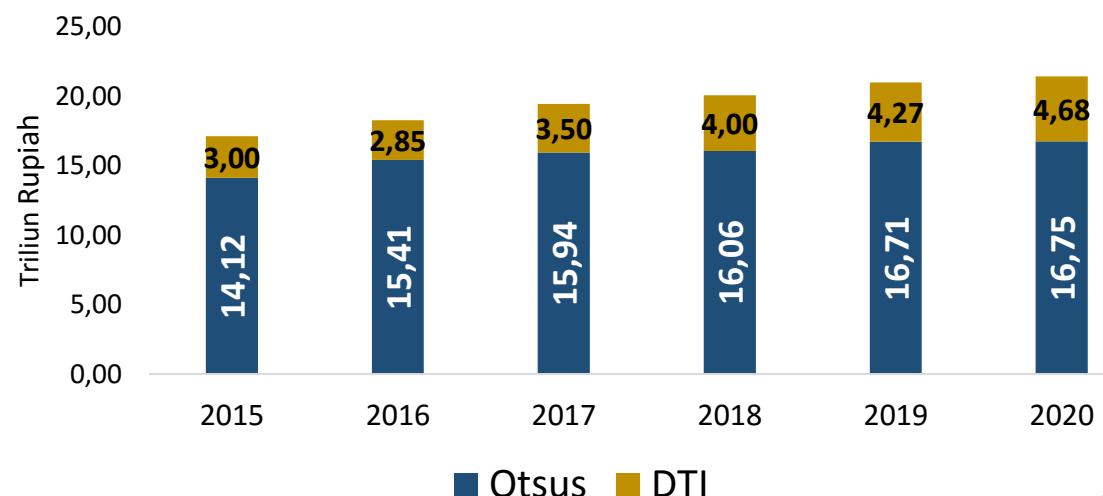


Meningkatkan sinkronisasi rencana penggunaan dengan prioritas nasional melalui pembahasan usulan dengan K/L terkait

ARAH KEBIJAKAN 2021

- **Penguatan** monitoring capaian output dengan **pengetatan persyaratan** penyaluran Dana OTSUS dan DTI;
- **Penguatan kebijakan** pembagian Dana Otsus antara Papua dan Papua Barat, **menggunakan indikator yang terukur** antara lain: jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kabupaten/kota/kampung, tingkat capaian pembangunan, dan tingkat kesulitan wilayah.

PERKEMBANGAN DANA OTSUS



KEBIJAKAN EXISTING 2020



Melanjutkan peningkatan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan.



Melanjutkan peningkatan kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.



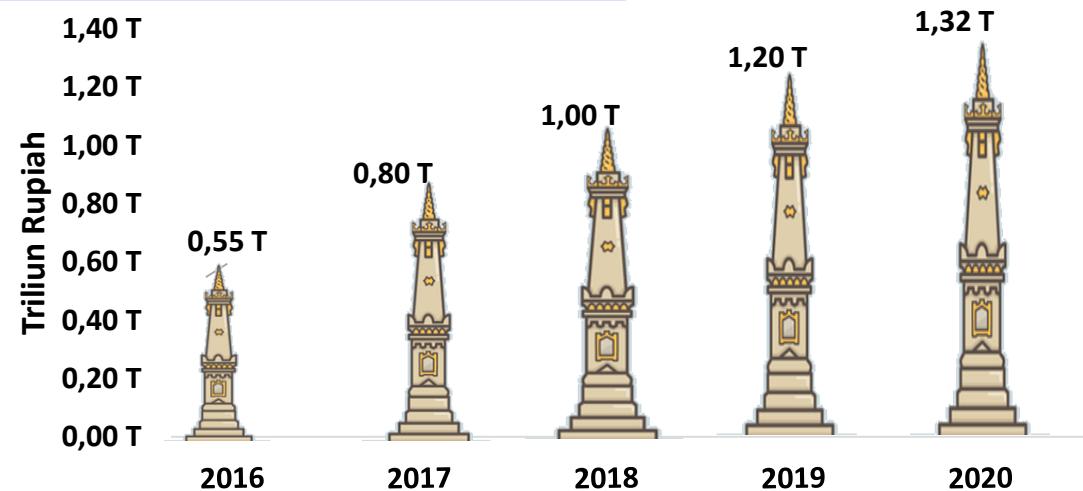
Melanjutkan percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah.



ARAH KEBIJAKAN 2021

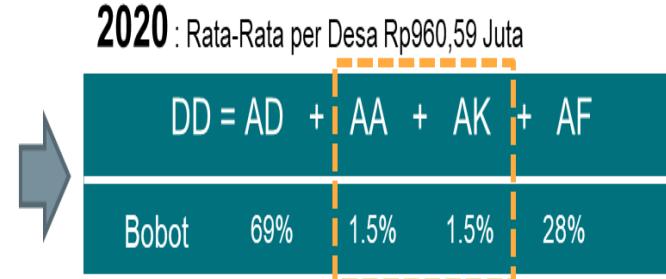
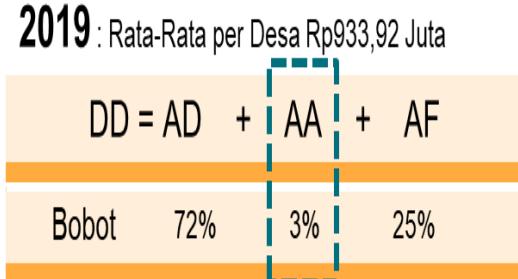
- ✓ **Menyusun** skala prioritas penggunaan DAIS jangka menengah sesuai dengan RPJMD dan prioritas nasional;
- ✓ **Memperkuat** peran **APIP** dalam pengelolaan DAIS serta penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Keistimewaan perlu diukur target dan capaian output/outcome.

PERKEMBANGAN DAIS DIY



KEBIJAKAN EXISTING 2020

- Menyempurnakan kebijakan pengalokasian, dengan:
 - ✓ Penyesuaian bobot Alokasi Dasar (AD) dan Alokasi Formula (AF) secara proporsional;
 - ✓ Pemberian Alokasi Afirmasi (AA) kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi;
 - ✓ Pemberian Alokasi Kinerja (AK) kepada desa-desa dengan kinerja terbaik.
- Meningkatkan porsi penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa.
- Memperbaiki mekanisme penyaluran Dana Desa



ARAH KEBIJAKAN 2021

- ✓ Melakukan **penyesuaian bobot** dan **metode perhitungan** Alokasi Dasar (AD), Alokasi Formula (AF), Alokasi Afirmasi (AA) dan Alokasi Kinerja (AK);
- ✓ **Memperkuat** peran Alokasi Kinerja (AK) dalam mendorong kinerja desa;
- ✓ **Meningkatkan porsi penggunaan** Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa;
- ✓ **Memperbaiki mekanisme** penyaluran Dana Desa dengan tetap berdasarkan evaluasi kinerja; dan
- ✓ **Meningkatkan kualitas** aparatur Desa melalui pelatihan dan pembinaan aparatur desa.

PERKEMBANGAN DANA DESA

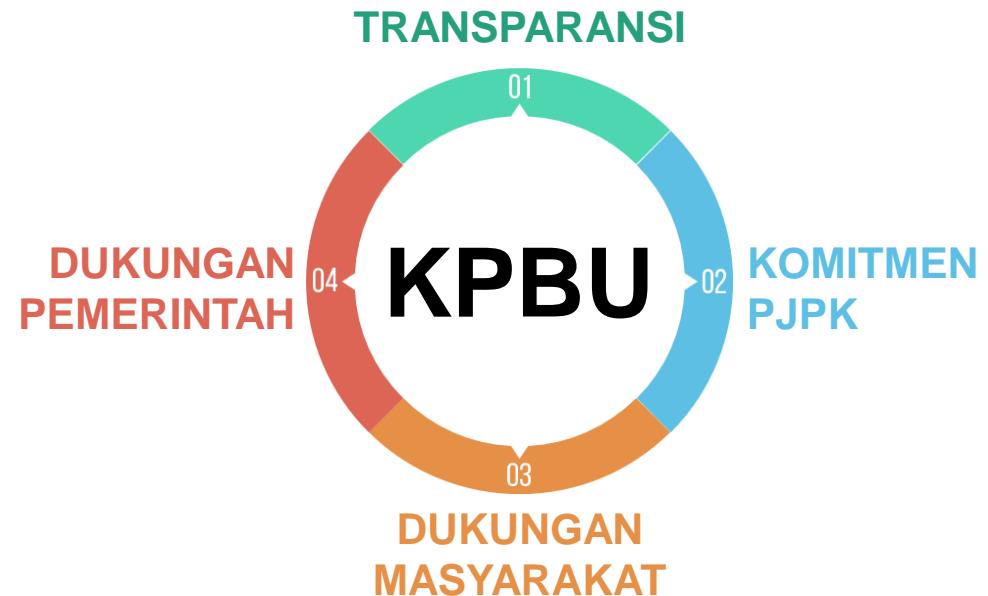


Pembiayaan Kreatif (1)



Optimalisasi berbagai alternatif pendanaan untuk mendukung pembangunan daerah

Alternatif Pembiayaan	Kriteria Kesesuaian					
	Tenor	Tingkat Suku Bunga	Risiko Nilai Tukar	Profil Risiko	Kompleksitas dan Biaya Transaksi	Ketersediaan
APBN/APBD	Tidak Berlaku	Tidak berlaku	Tidak berlaku	Tidak berlaku	Rendah	Terbatas
Pinjaman PT. SMI	Hingga 5 tahun	8-8,5% (sesuai tenor)	Utang dalam Rupiah	Dijamin Pemerintah, pemotongan transfer ke pemda debitur bila terjadi gagal bayar	Sedang	PT SMI memiliki dana yang cukup untuk jangka menengah
Obligasi Daerah	10-15 tahun	Sekitar 10% (AA)	Utang dalam Rupiah	Tidak ada jaminan Pemerintah	Tinggi	Potensi besar
Pinjaman Daerah (BPD)	<10 tahun	>12%	Utang dalam Rupiah	Tidak ada jaminan Pemerintah	Sedang	Pagu pinjaman relative kecil
Kerjasama Pemda dan Badan Usaha (KPBU)	10-30 tahun	16-18%	Pembiayaan dapat berupa mata uang asing	Tergantung alokasi risiko	Sangat Tinggi	Potensi besar dan ketersediaan proyek sesuai



- APBN/APBD yang *available* tidak cukup untuk mendanai kebutuhan infrastruktur;
- Beberapa opsi pembiayaan bisa digunakan seperti pinjaman daerah, obligasi daerah, dan KPBU;
- Kemenkeu telah menugaskan *Special Mission Vehicle*-nya seperti PT. SMI dan PT. PII untuk dukungan dan akselerasi skema alternatif pembiayaan daerah;
- Pemerintah juga menyiapkan dukungan untuk skema KPBU berupa dukungan penyiapan (PDF) dan dukungan kelayakan (VGF);
- Skema pembiayaan tersebut, perlu adanya komitmen pemda, dukungan masyarakat dan transparansi



Pemanfaatan pembiayaan harus tetap memperhatikan *sustainability* dan kebijakan pengendalian defisit

- Batas Maksimal **Kumulatif** Defisit APBD TA 2020 yang dibiayai dari Pinjaman Daerah:

0.28%
dari PDB



- Batas Maksimal **Defisit APBD masing-masing daerah** TA 2020 yang dibiayai dari Pinjaman Daerah:

Kapasitas Fiskal	Batas Maksimal Defisit*	Jumlah Daerah
Sangat Tinggi	4.5%	46 (4 Prov, 26 Kab, 16 Kota)
Tinggi	4.25%	91 (5 Prov, 72 Kab, 14 Kota)
Sedang	4%	135 (8 Prov, 102 Kab, 25 Kota)
Rendah	3.75%	134 (8 Prov, 107 Kab, 19 Kota)
Sangat Rendah	3.5%	136 (9 Prov, 108 Kab, 19 Kota)

*dari Pendapatan Daerah

- Batas Maksimal Kumulatif Defisit dan Defisit APBD TA 2021 akan ditetapkan **Bulan Agustus 2020**

Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Spending better untuk mempercepat perbaikan kuantitas dan kualitas layanan publik



Perpres 33/2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

Regulasi satuan biaya: Perjalanan Dinas, Paket Rapat, Honorarium, Pengadaan Kendaraan Dinas, serta Pemeliharaan Sarana dan Inventaris Kantor.

Rancangan Bagan Akun Standar (BAS) Daerah

Regulasi kodefikasi dan klasifikasi akun-akun APBD dan sinkron dengan APBN, serta konsolidasi dan penyusunan statistik keuangan pusat dan daerah, termasuk standardisasi dan simplifikasi program/kegiatan dan output.

Rancangan Regulasi Tunjangan Tambahan Penghasilan PNSD

Evaluasi dan penyusunan regulasi mengenai tata cara pemberian tunjangan tambahan penghasilan PNSD berdasarkan progres reformasi birokasi pemda dan kinerja pegawai.

Pengetatan Mandatory Spending

Akan dilakukan evaluasi dan pengetatan pelaksanaan pemenuhan Mandatory Spending (kesehatan, pendidikan, infrastruktur dari DTU, dan kewajiban ADD)



Redesign Sistem Penganggaran



Latar Belakang



Program belanja pusat dan daerah saat ini tidak sinkron sehingga capaian kinerjanya tidak optimal.



Program yang digunakan dalam dokumen Perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda, sehingga sulit dikonsolidasikan.



Rumusan Nomenklatur Program dan Outcome dari sebuah program tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif).



Informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik.

Tujuan/Manfaat

- 1 Secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara Visi Misi Presiden – Fokus Pembangunan (arahan Presiden) Agenda Pembangunan dan Tugas Fungsi K/L dan Daerah.
- 2 Dengan Redesign Sistem Penganggaran tidak dibutuhkan fasilitas “Tagging”, namun apabila diperlukan, fasilitas tagging dapat dilakukan secara terbatas.
- 3 Rumusan program dan outcome serta kegiatan dan output menjadi semakin jelas.
- 4 Redesign Sistem Penganggaran merupakan upaya untuk penguatan penerapan penganggaran berbasis kinerja

Perumusan program :

1. Program tidak mencerminkan tusi SKPD, namun mencerminkan prioritas daerah yang sejalan dengan prioritas nasional.
2. Program dapat bersifat lintas SKPD dan bahkan juga lintas K/L dan SKPD

Perumusan *outcome*:

Mencerminkan hasil kinerja program, dengan indikator ukuran yang bersifat kualitatif dan kuantitatif

Perumusan Kegiatan:

1. Lebih mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh SKPD untuk menghasilkan output yang mendukung *outcome*
2. Kegiatan dapat bersifat lintas SKPD
3. Penyusunan anggaran per kegiatan menggunakan standar biaya yang telah ditetapkan (Perpres No 33 Tahun 2020)

Perumusan *Output*:

- i. mencerminkan output strategis yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat
- ii. Hasilnya dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif



Terima Kasih